

Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

The Impact of the Privileges Funds on Regional Disparities of
Economic Development in Yogyakarta Province

Dinda Luthfiani Tjahjanto¹, Akhmad Fauzi¹, Bambang Juanda¹

Diterima: 12 Agustus 2020

Disetujui: 6 Oktober 2022

Abstrak: Makalah ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap output untuk mengurangi disparitas daerah terhadap pembangunan ekonomi di Provinsi DIY. Analisis dalam makalah ini menggunakan model ekonometrik data panel yang menggambarkan pengaruh sumber pendapatan daerah terhadap output untuk mengurangi ketimpangan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemui bahwa Dana Keistimewaan Yogyakarta belum memiliki pengaruh yang besar dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi. Dana Keistimewaan Yogyakarta hanya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana belanja modal sendiri memiliki pengaruh yang berbeda antara model kota dengan model kabupaten terhadap kinerja pembangunan.

Kata Kunci: Ketimpangan Wilayah, Pembangunan Ekonomi, Dana Keistimewaan Yogyakarta

Abstract: This paper aims to analyze the effect of local revenue on output to reduce regional disparity of economic development in DIY Province. The analysis in this paper uses a panel data econometric model that describes the effect of local revenue sources on output to reduce inequality. Based on panel data analysis, Privileged Funds of Yogyakarta do not have yet a major influence in overcoming the inequality problem of development that occurred. Based on the research results, it was found that Privileged Fund of Yogyakarta only significantly affect capital expenditure, where capital expenditure itself has a different effect in the city model from the district model on development performance.

Keywords: Regional Disparity, Economic Development, Privileged Funds of Yogyakarta

PENDAHULUAN

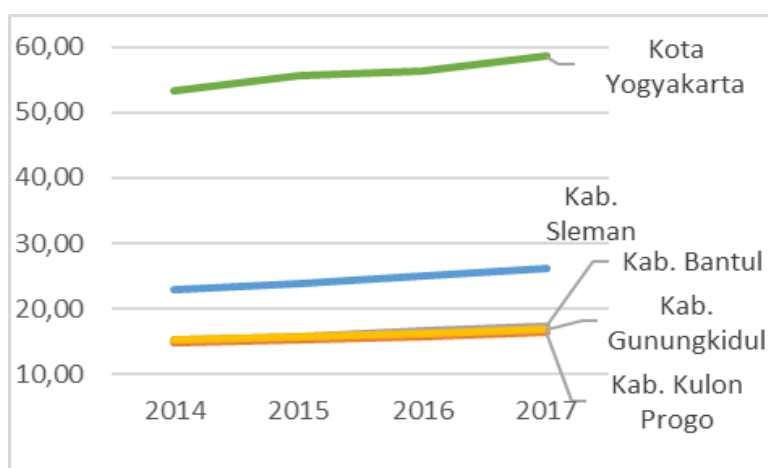
Ketimpangan antar wilayah merupakan hal yang tidak dapat terelakan dari proses pembangunan. Perbedaan kandungan sumberdaya alam dan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah mengakibatkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunannya menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (*developed region*) dan daerah terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2012). Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang merata diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan

¹ Institut Pertanian Bogor

Korespondensi: dindaluthfianitjahjanto@gmail.com

ekonomi yang cepat apabila tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah *hinterland* mengalami pengurangan sumberdaya yang berlebih (Rustiadi et al, 2011).

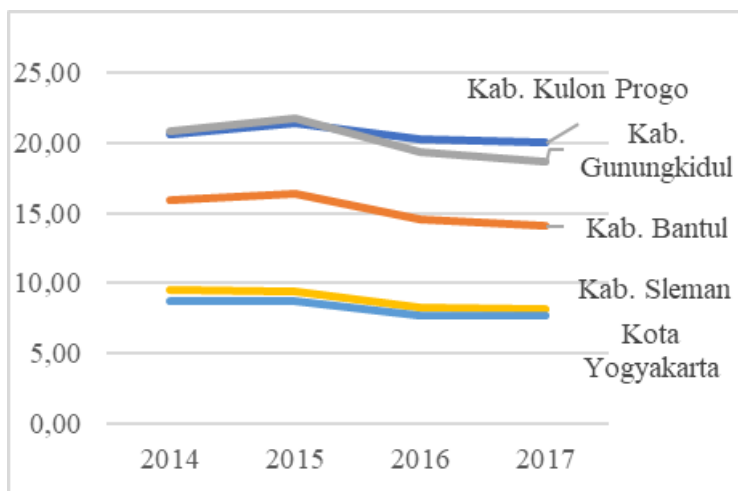
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dengan daya tarik pariwisata tertinggi di Indonesia, namun DIY memiliki tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia. Pada Maret 2018, Indeks Gini DIY sebesar 0,441 melebihi nilai Indeks Gini nasional yaitu 0,389. Begitu pula dengan nilai Indeks Williamson DIY yang cenderung meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2007 sebesar 0,440 dan menjadi 0,481 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya terjadi ketimpangan pendapatan namun juga ada ketimpangan antar wilayah yang terus meningkat di Provinsi DIY. Ketimpangan lainnya juga dapat dilihat dari indikator pembangunan lainnya seperti PDRB perkapita, kemiskinan, dan IPM antar kabupaten kota di Provinsi DIY.



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 1. PDRB Perkapita Kabupaten Kota di Provinsi DIY (Juta Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1, terlihat ketimpangan PDRB perkapita yang terjadi di Provinsi DIY. Kota Yogyakarta memiliki nilai PDRB perkapita yang paling besar diantara kabupaten lain yaitu sebesar 58,59 juta rupiah pada tahun 2017, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kulon Progo dengan PDRB perkapita sebesar 16,55 juta rupiah pada tahun 2017. Selain PDRB perkapita, ketimpangan di Provinsi DIY juga terlihat dari penduduk miskin di setiap kabupaten kota. Berdasarkan Gambar 2, terlihat perbedaan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY. Kabupaten Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu 20,03% pada tahun 2017, sedangkan Kota Yogyakarta 7,64% pada tahun 2017. Apabila dilihat dari nilai IPM, kabupaten kota di Provinsi DIY tidak menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 Kota Yogyakarta memiliki IPM yang tertinggi yaitu 85,49 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 68,73.



Sumber : Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Gambar 2. Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY Tahun 2014-2017 (dalam %)

Jika dilihat dari PDRB perkapita, tingkat kemiskinan dan IPM, dapat diketahui bahwa beberapa wilayah di berbagai indikator ketimpangan tersebut memiliki nilai yang hampir mendekati. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat kemiskinan dan IPM yang berdekatan, begitu pula antara Kabupaten Sleman dengan Kota Yogyakarta. Perbedaan sumber daya alam, demografi, dan kondisi geografis dari tiap kabupaten kota yang ada di Provinsi DIY menciptakan peluang terjadinya ketimpangan wilayah. Ketimpangan yang terjadi juga merupakan dampak dari pembangunan yang tidak merata. Pembangunan sarana dan prasarana lebih diutamakan di daerah yang secara geografis dekat dengan pusat perkotaan.

Masalah ketimpangan juga dapat dilihat dari anggaran yang digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan wilayahnya, seperti adanya DAU yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah serta DAK yang memang difokuskan terhadap pembiayaan infrastruktur daerah, serta Danais untuk mendanai urusan keistimewaan. Adanya sumber pembiayaan yang dapat mendukung proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan di Provinsi DIY. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap *output* untuk mengurangi ketimpangan.

METODE

Analisis pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap *output* untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah di Provinsi DIY menggunakan analisis regresi data panel atau yang juga disebut sebagai data longitudinal, yaitu gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data *cross section* merupakan data dari beberapa observasi yang dikumpulkan pada satu waktu yang sama. Sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika menggunakan data *cross section* maupun data *time series* (Gujarati, 2003).

Data yang digunakan dalam makalah ini merupakan data sekunder dari tahun 2007 hingga 2017, yang sebagian besar diperoleh dari publikasi tahunan Provinsi DIY. Penelitian ini menggunakan model ekonometrik data panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 kabupaten/kota di Provinsi DIY dengan kurun waktu 11 tahun dari tahun 2007 sampai 2017. Model untuk menganalisis pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap *output* untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model pengaruh dana transfer terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa. Kemudian dilanjutkan dengan model pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap kinerja pembangunan (PDRB perkapita, kemiskinan, IPM, dan Indeks Gini) yang menggambarkan kondisi ketimpangan pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan PDRB perkapita, kemiskinan, IPM dan Indeks Gini sebagai variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi PAD, DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan, sementara variabel mediasinya yaitu belanja modal dan belanja barang dan jasa, pendekatan ini seperti yang dilakukan dalam penelitian Juanda et al. (2017). Adapun modelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Model pengaruh dana transfer terhadap belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai.

- a. Persamaan Belanja Modal

$$\begin{aligned} \text{Ln_BM}_{it} = & \alpha_{it} + \alpha_1 \text{Ln_PAD}_{it} + \alpha_2 \text{Ln_DAK}_{it} + \alpha_3 \text{Ln_Danaisit} + \\ & \alpha_4 \text{Ln_PAD}_{it}^{*dk} + \alpha_5 \text{Ln_DAK}_{it}^{*dk} + \alpha_6 \text{Ln_Danaisit}^{*dk} \\ & + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

- b. Persamaan Belanja Barang dan Jasa

$$\begin{aligned} \text{Ln_BB}_{it} = & \alpha_{it} + \alpha_1 \text{Ln_PAD}_{it} + \alpha_2 \text{Ln_DAU}_{it} + \alpha_3 \text{Ln_DAK}_{it} + \\ & \alpha_5 \text{Ln_Danaisit} + \alpha_6 \text{Ln_PAD}_{it}^{*dk} + \alpha_7 \text{Ln_DAU}_{it}^{*dk} + \\ & \alpha_9 \text{Ln_Danaisit}^{*dk} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

2. Model pengaruh belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai terhadap kinerja pembangunan. Dimana ketimpangan antar kabupaten/kota implisit digambarkan dalam persamaan PDRB perkapita, kemiskinan dan IPM.

- a. Persamaan PDRB Perkapita

$$\begin{aligned} \text{Ln_PDRBK}_{it} = & \alpha_{it} + \alpha_1 \text{Ln_BM}_{it} + \alpha_2 \text{Ln_BB}_{it} + \alpha_3 \text{Ln_LPE}_{it} + \\ & \alpha_4 \text{Ln_BM}_{it}^{*dk} + \alpha_5 \text{Ln_BB}_{it}^{*dk} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

- b. Persamaan IPM

$$\begin{aligned} \text{Ln_IPM}_{it} = & \alpha_{it} + \alpha_1 \text{Ln_BM}_{it} + \alpha_2 \text{Ln_BB}_{it} + \alpha_3 \text{Ln_RS}_{it} + \alpha_4 \\ & \text{Ln_TPT}_{it} + \alpha_5 \text{Ln_BB}_{it}^{*DK} + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (4)$$

c. Persamaan Kemiskinan

$$\ln_TKMit = \alpha_{it} + \alpha_1 \ln_BMit + \alpha_2 \ln_BBJit + \alpha_3 \ln_LPEit + \alpha_4 \ln_BMit*dk + \alpha_5 \ln_BBJit*dk + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

Dimana:

- BMit = Belanja modal di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- BBJit = Belanja barang dan jasa di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- PADit = Pendapatan Asli Daerah di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- DAUit = Dana Alokasi Umum di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- DAKit = Dana Alokasi Khusus di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- Danaisit = Dana Keistimewaan di daerah i pada tahun t (ribu rupiah)
- dk = Variabel *dummy* kabupaten kota
 - DK = 1, (Kota Yogya dan Kabupaten Sleman)
 - DK = 0, (Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul)
- PDRBKit = PDRB perkapita di daerah i pada tahun t (juta rupiah)
- TKMit = Tingkat kemiskinan di daerah i pada tahun t (persen)
- IPMit = Indeks Pembangunan Manusia di daerah i pada tahun t
- LPEit = Laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah i pada tahun t (persen)
- TPTit = Tingkat pengangguran terbuka di daerah i pada tahun t (persen)
- RSit = Rasio jumlah rumah sakit terhadap jumlah penduduk di daerah i pada tahun t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi DIY merupakan salah satu provinsi yang memiliki hak desentralisasi asimetris. Dalam desentralisasi asimetris ini terdapat pula asimetris transfer fiskal yang berarti provinsi tersebut menerima tambahan transfer dana perimbangan dari pusat. Dengan adanya asimetris transfer fiskal DIY memiliki tambahan sumber penerimaan yaitu Dana Keistimewaan, sehingga sumber utama penerimaan daerah berasal dari PAD, DAU, DAK, DBH, serta Dana Keistimewaan. Sumber penerimaan ini dialokasikan sesuai dengan dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan daerah otonomi khusus di Provinsi DIY dalam mengalokasikan sumber penerimaan daerahnya dapat mempengaruhi kinerja pembangunan daerah melalui belanja modal serta belanja barang dan jasa. Sumber-sumber penerimaan daerah selanjutnya dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mensejahterakan masyarakatnya. Namun pada kenyataannya pengeluaran pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin sehingga kurangnya pengaruh bagi kinerja pembangunan (Abrar, 2018). Dengan diberikannya dana keistimewaan sebagai sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kinerja pembangunan ekonomi guna mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi di Provinsi DIY.

Pengaruh Sumber Penerimaan Daerah terhadap Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa

Dari hasil regresi data panel didapat diperoleh hasil variabel yang berpengaruh terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 1 berikut

Tabel 1. Koefisien Pengaruh Sumber Penerimaan Terhadap Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa

Variabel Independen	BM		BBJ	
	Coef.	Sig.	Coef.	Sig.
Constanta	10.2575	0.000	-0.1684	0.982
PAD	0.3005	0.000*	0.3749	0.010*
DAK	0.1571	0.057**	0.1058	0.078**
DAU	-	-	0.4970	0.286
Danais	0.0157	0.028*	0.0038	0.611
dk	1.0508	0.560	7.9127	0.812
PAD*dk	-	-	0.9415	0.323
DAU*dk	-	-	-1.2895	0.604
DAK*dk	-0.0812	0.439	-	-
Danais*dk	0.0152	0.164	-0.1684	0.701
R-squared	0.7157		0.7390	

Persamaan model pengaruh sumber penerimaan terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa di kota adalah sebagai berikut:

$$\ln_BM_{it} = 11,3083 + 0,3005 \ln_PAD_{it} + 0.0759 \ln_DAK_{it} + 0.0309 \ln_Danais_{it} + e_{it} \quad (6)$$

$$\ln_BBJ_{it} = 7,7443 + 1,3164 \ln_PAD_{it} + 0.1058 \ln_DAK_{it} - 0.7925 \ln_DAU_{it} - 0.1646 \ln_Danais_{it} + e_{it} \quad (7)$$

Persamaan model pengaruh sumber penerimaan terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa di kabupaten adalah sebagai berikut:

$$\ln_BM_{it} = 10,2575 + 0,3005 \ln_PAD_{it} + 0.1571 \ln_DAK_{it} + 0.0157 \ln_Danais_{it} + e_{it} \quad (8)$$

$$\ln_BBJ_{it} = -0,1684 + 0,3749 \ln_PAD_{it} + 0.1058 \ln_DAK_{it} + 0.497 \ln_DAU_{it} + 0.0038 \ln_Danais_{it} + e_{it} \quad (9)$$

Berdasarkan Tabel 1, belanja modal signifikan dipengaruhi oleh PAD, DAK dan dana keistimewaan. PAD merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya baik di kota maupun kabupaten. Perbedaan pengaruh belanja modal di kota dan kabupaten yaitu nilai elastisitas DAK lebih besar di kabupaten yaitu sebesar 0.1571 persen artinya lebih besar 0.0812 persen dibandingkan DAK untuk kota, serta nilai elastisitas dana keistimewaan yang lebih besar 0.0152 persen di kota. Belanja barang dan jasa signifikan dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Nilai elastisitas PAD lebih besar 0.9415 persen untuk model kota. Dampak DAU dan dana keistimewaan terhadap belanja barang dan jasa tidak berpengaruh signifikan, namun nilai elastisitasnya lebih besar di kabupaten, hal ini dikarenakan pertumbuhan DAU dan dana keistimewaan yang bernilai negatif di model kota.

Hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa. PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari retribusi, pajak, pengelolaan hasil daerah dan pendapatan lainnya yang berarti dengan semakin besarnya PAD maka pemerintah daerah semakin mandiri dalam mendanai program-program pembangunannya. Dalam analisis ini PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa, maka semakin besar PAD di kabupaten/kota maka semakin besar pula kabupaten/kota tersebut mendanai belanja modal serta belanja barang dan jasanya. Hasil ini serupa dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Juniawan & Suryantini (2018) serta Rahayu (2019), dimana Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal.

Variabel DAK juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa. Pada belanja modal, nilai elastisitas lebih tinggi di model kabupaten dibandingkan model kota. Hal ini berarti bahwa DAK memiliki peran yang lebih besar di kabupaten dalam membiayai pengeluaran daerahnya, dimana DAK sendiri bertujuan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Wandira (2013) serta Sari & Wirama (2018).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana keistimewaan hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan nilai elastisitas yang lebih besar pada model kota sebesar 0.0157 persen, artinya pengaruh dana keistimewaan lebih besar di kota dibandingkan di kabupaten. Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan bahwa urusan keistimewaan DIY bukanlah kewajiban kabupaten/kota melainkan kewenangan pemerintah provinsi sehingga pemerintah kabupaten/kota (sebagai Kuasa Pengguna Anggaran) memilih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD. Keterbatasan SDM juga ditemui dilapangan dimana dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY menambah beban kerja pegawai di lingkungan pemda, dimana SDM yang ada sudah ditugaskan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sehingga kekurangan SDM untuk melaksanakan program dan kegiatan yang didanai oleh dana keistimewaan (Sakir & Mutiarin, 2015). Berdasarkan penelitian Sulistiono & Efendi (2018) ditemukan bahwa kendala dalam pengalokasian Dana Keistimewaan adalah program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan tidak mampu mensejahterakan masyarakat secara umum.

Pengaruh Sumber Penerimaan Daerah Melalui Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap Kinerja Pembangunan

Setelah diketahui pengaruh sumber penerimaan daerah terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa, maka selanjutnya mencari pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap kinerja pembangunan (PDRB perkapita, IPM dan kemiskinan). Dengan asumsi bahwa ketimpangan dalam model ini digambarkan melalui kinerja pembangunan, sehingga melihatnya mulai dari sumber dana/pendapatan daerah ke belanja daerah kemudian kinerja pembangunan. Dengan demikian pada bagian ini akan melihat bagaimana pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap PDRB perkapita, IPM dan kemiskinan.

a. Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB Perkapita

Model ini melihat pengaruh belanja modal t-1 (tahun sebelumnya), belanja barang dan jasa t-1, laju pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten terhadap PDRB perkapita. Dengan R-Squared 0.9607, model ini ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB Perkapita

Variabel Independen	PDRB Perkapita	
	Coef.	Sig.
Constanta	5.54157	0.000
BMt-1	-0.19326	0.000*
BBJt-1	0.39483	0.000*
LPE	0.20685	0.242
dk	1.02036	0.451
BMt-1*dk	0.21773	0.039
BBJt-1*dk	-0.21466	0.010
R-Squared	0.9607	

Persamaan model pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap PDRB perkapita di kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln_PDRBkap}_{it} = 6.56193 + 0.02447 \text{ ln_BMt-1}_{it} + 0.18017 \text{ ln_BBJt-1}_{it} - 0.20685 \text{ ln_LPE}_{it} + e_{it} \quad (10)$$

$$\text{Ln_PDRBkap}_{it} = 5.54157 - 0.19326 \text{ ln_BMt-1}_{it} + 0.39483 \text{ ln_BBJt-1}_{it} - 0.20685 \text{ ln_LPE}_{it} + e_{it} \quad (11)$$

Persamaan diatas menggambarkan pengaruh langsung belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap PDRB perkapita kota (persamaan 10) dan kabupaten (persamaan 11) di Provinsi DIY. Berdasarkan Tabel 2, PDRB perkapita signifikan dipengaruhi oleh belanja modal serta belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa memiliki pengaruh terbesar terhadap PDRB perkapita. Belanja barang dan jasa di kabupaten lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan PDRB perkapita dibandingkan belanja barang dan jasa di kota. Variabel belanja modal memiliki pengaruh yang berbeda antara di kota dengan di kabupaten. Di kota belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap PDRB perkapita, sedangkan di kabupaten pengaruhnya negatif. Hal ini berarti semakin tinggi belanja modal di kabupaten akan menurunkan PDRB perkapitanya.

Pengaruh belanja modal terhadap PDRB perkapita yang negatif di kabupaten mungkin saja terjadi karena pertumbuhan ekonomi eksklusif, dimana pembangunan yang terjadi kurang berkualitas dan merata sehingga pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja modal tidak disertai dengan peningkatan PDRB perkapita di kabupaten. Hal ini serupa dengan hasil penelitian Arini (2016), dimana belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Tengah khususnya belanja modalnya belum di alokasikan secara efisien sehingga PDRB perkapita masih tergolong rendah.

b. Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap IPM

Model ini melihat pengaruh belanja modal t-1 (tahun sebelumnya), belanja barang dan jasa t-1, jumlah rumah sakit per 1000 penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM. Dengan R-Squared 0.8983, model ini ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap IPM

Variabel Independen	IPM	
	Coef.	Sig.
Constanta	3.78710	0.000
BM _{t-1}	0.00149	0.896
BBJ _{t-1}	0.03283	0.031*
RS	0.04563	0.000*
TPT	0.06214	0.000*
dk	-0.27579	0.336
BBJ _{t-1} *dk	0.01621	0.283
R-Squared	0.8983	

Persamaan model pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap IPM di kota dan kabupaten adalah sebagai berikut:

$$\ln_IPM_{it} = 3.51131 + 0,00149 \ln_BMt-1_{it} + 0.04904 \ln_BBJt-1_{it} + 0.04563 \ln_RS_{it} + 0.06214 \ln_TPT_{it} + e_{it} \quad (12)$$

$$\ln_IPM_{it} = 3.78710 + 0,00149 \ln_BMt-1_{it} + 0.03283 \ln_BBJt-1_{it} + 0.04563 \ln_RS_{it} + 0.06214 \ln_TPT_{it} + e_{it} \quad (13)$$

Persamaan diatas menggambarkan pengaruh langsung belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap IPM kota (persamaan 12) dan kabupaten (persamaan 13) di Provinsi DIY. Berdasarkan Tabel 3, IPM signifikan dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa, jumlah rumah sakit per 1000 penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka adalah variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap IPM, hal ini serupa dengan hasil penelitian Fibrian & Widodo (2016) dimana IPM Provinsi DIY dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka.

Terdapat perbedaan pengaruh belanja barang dan jasa antara kota dan kabupaten, dimana belanja barang dan jasa memiliki pengaruh lebih besar di kota dibandingkan di kabupaten. Perbedaan nilai elastisitas belanja barang dan jasa ini menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa di kota lebih besar kontribusinya dalam meningkatkan IPM. Hasil regresi menunjukkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sasti & Latrini (2019) juga mengungkapkan hal serupa dalam penelitiannya, dimana belanja operasi signifikan mempengaruhi IPM sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh terhadap IPM.

c. Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang dan Jasa terhadap Tingkat Kemiskinan

Model ini melihat pengaruh belanja modal t-1 (tahun sebelumnya), belanja barang dan jasa t-1, jumlah rumah sakit per 1000 penduduk, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap IPM. Dengan R-Squared 0.8983, model ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Pengaruh Belanja Modal serta Belanja Barang & Jasa terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Independen	TKM	
	Coef.	Sig.
Constanta	8.15967	0.000
BMt-1	0.28020	0.005*
BBJt-1	-0.51100	0.000*
LPE	-0.62314	0.080**
dk	-1.68624	0.531
BMt-1*dk	-0.41461	0.048*
BBJt-1*dk	0.47183	0.005*
R-Squared	0.7600	

Persamaan model pengaruh belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap tingkat kemiskinan (TKM) di kota dan kabupaten adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ln_TKM}_{it} = & 6.47343 - 0.13441 \text{Ln_BMt-1}_{it} - 0.03917 \text{Ln_BBJt-1}_{it} - 0.62314 \\ & \text{Ln_LPE}_{it} + e_{it} \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} \text{Ln_TKM}_{it} = & 8.15967 + 0.28020 \text{Ln_BMt-1}_{it} - 0.51100 \text{Ln_BBJt-1}_{it} - 0.62314 \\ & \text{Ln_LPE}_{it} + e_{it} \end{aligned} \quad (19)$$

Persamaan diatas menggambarkan pengaruh langsung belanja modal serta belanja barang dan jasa terhadap tingkat kemiskinan kota dan kabupaten di Provinsi DIY. Berdasarkan Tabel 4, tingkat kemiskinan signifikan dipengaruhi oleh belanja modal, belanja barang dan jasa, dan laju pertumbuhan ekonomi. Model kota (persamaan 18) menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat kemiskinan.

Model kabupaten (persamaan 19) menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat kemiskinan. Belanja barang dan jasa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Belanja modal pada model kabupaten memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti setiap naiknya belanja modal sebesar 0.28 satuan maka tingkat kemiskinannya juga meningkat sebesar 1 satuan. Hal ini serupa dengan penelitian Kaligis et al (2017) yang menyebutkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Namun secara tidak langsung dengan variabel intervening pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik, belanja modal kabupaten/kota di Provinsi DIY signifikan dipengaruhi oleh PAD, DAK dan dana keistimewaan, sedangkan belanja barang dan jasa signifikan dipengaruhi oleh PAD dan DAK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dana keistimewaan memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal serta belanja barang dan jasa, namun hanya memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan nilai elastisitas yang lebih besar pada model kota sebesar 0.0157 persen, artinya pengaruh dana keistimewaan lebih besar di kota dibandingkan di kabupaten. Dana Keistimewaan Yogyakarta belum memiliki pengaruh yang besar dalam mengatasi masalah ketimpangan pembangunan yang terjadi. Dana Keistimewaan Yogyakarta hanya berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana belanja modal sendiri memiliki pengaruh yang berbeda antara model kota dengan model kabupaten terhadap kinerja pembangunan.

Pengaruh sumber penerimaan daerah melalui belanja modal dan belanja barang dan jasa terhadap kinerja pembangunan adalah sebagai berikut. PDRB perkapita signifikan dipengaruhi oleh belanja modal serta belanja barang dan jasa. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap PDRB perkapita, sedangkan di kabupaten pengaruhnya negatif. Belanja barang dan jasa memiliki pengaruh lebih besar terhadap PDRB perkapita di kabupaten dibandingkan di kota. IPM signifikan dipengaruhi oleh belanja barang dan jasa, namun terdapat perbedaan pengaruh belanja barang dan jasa antara kota dan kabupaten, dimana belanja barang dan jasa memiliki pengaruh lebih besar di kota dibandingkan di kabupaten. Tingkat kemiskinan signifikan dipengaruhi oleh belanja modal dan belanja barang dan jasa, namun pada model kabupaten belanja modal memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. 2018. Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Pembangunan Ekonomi di Provinsi Aceh [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Arini, P. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercubuana*. 2(2):33-50
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Indeks Gini Nasional. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. IPM Provinsi DIY. BPS DIY.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. Annual Report of DIY Province 2017-2018. BPS DIY.
- Fibrian, F. & Widodo, E. 2016. Analisis Jalur terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan 2016, 256-263.
- Gujarati, D. 2003. Basic Econometrics. New York (US): McGraw-Hill.
- Juanda, B., Suratman, E., Handra, H. 2017. The Fiscal Effect on Regional Inequality. Presentation at The 6th IRSA International Institute Manado, July 17-18.
- Juniawan, M., & Suryantini, N. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*. 7(3):1255-1281.
- Kaligis, E., Engka, D., Tolosang, K. 2017. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening Variabel. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 17(2):94-105.
- Rahayu, R. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (JIET)*.4(2): 2019.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., Panuju, D.R. 2011. Perencanaan Pengembangan Wilayah. Jakarta (ID): Yayasan Obor dan Crestpent Press.
- Sakir & Mutiarin, D. 2015. Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2(3):462-492.
- Sari, D. & Wirama, D. 2018. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK pada Alokasi Belanja Modal dengan Pendapatan Perkapita Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. 22(3):2065-2087.
- Sasti, I. & Latrini, M. 2019. Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26(2):1632-1659.
- Sjafrizal. 2012. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Sulistiono, B. & Efendi, D. 2018. Evaluation of the Use of Privileged Funds of Yogyakarta on Cultural Sector in Sleman 2016. *Forum Ilmu Sosial*. 45(2):87-105.
- Wandira, A. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2(1):45-50.